



**LAPORAN PENELITIAN MANDIRI
POLARISASI POLITIK ELIT MUHAMMADIYAH
DALAM PILPRES 2019**

**Oleh
Debbie Affianty
NIDN: 0326017403**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2020**

Internalisasi AIK dalam Hasil Penelitian

Penelitian ini terkait dengan sikap politik para tokoh Muhammadiyah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 lalu. Meskipun persyarikatan Muhammadiyah menegaskan sikap netralnya dalam kontestasi pemilihan kepala negara tersebut, warga Muhammadiyah diberi kebebasan untuk mengartikulasikan aspirasi politiknya. Tidak heran kalau kemudian para tokoh Muhammadiyah dan warga persyarikatan pada umumnya memiliki pilihan politik yang berbeda-beda terhadap dua kandidat Presiden dan Wakil Presiden.

Perbedaan pilihan itu sebenarnya memiliki titik temu yang sama yakni keinginan mereka untuk melakukan perbaikan negeri ini, melalui pemilihan pemimpin yang dapat mengemban amanah sesuai dengan misi Muhammadiyah. Inilah hakekat dakwah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam *amar ma'ruf nahi munkar* mewujudkan Islam berkemajuan. Hal itu ditegaskan dalam QS. Ali Imran: 104 berikut:

104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar²¹⁷); mereka-lah orang-orang yang beruntung.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa KH. Ahmad Dahlan (Persada UAD) KH Dr Anhar Ansori MSi menyatakan bahwa ayat 104 dari surat Ali Imran itu merupakan ayat perubahan yang menggerakkan Muhammadiyah untuk melakukan pencerahan (*tanwir*) dan pembebasan (*tahrir*). Menurut Anhar, kata *al-khair* dalam ayat itu memiliki tafsir sebagai sikap mengikuti petunjuk al-Quran dan Sunnah Nabi. Sementara kata *al-ma'ruf*, menurut Anhar memiliki arti sebagai hasil cipta, karya dan karsa manusia yang membawa kemaslahatan, yang tidak ada dalam al-Quran. Itulah yang menjadi pegangan Muhammadiyah. Oleh karena itu, kata Anhar, sesuatu yang tidak ada dalam Quran dan Hadis belum tentu *bid'ah*, bisa jadi itu adalah *al-ma'ruf*. *Al-Ma'ruf* itu didapat dari membaca alam semesta, sebagaimana diisyaratkan dalam wahyu pertama Nabi Muhammad, *iqra' bismi rabbika allazi khalaq*. Kalimat *waulla-ika humu al-muflihuuna*, oleh Anhar dipahami sebagai sekelompok orang yang melakukan perubahan. Sekelompok orang itu mengindikasikan pentingnya suatu wadah untuk melakukan perubahan, yaitu organisasi, seperti Muhammadiyah.[1]

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, hasil dan luaran yang dicapai.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, secara politik, telah membelah masyarakat Indonesia ke dalam dua kubu yang saling bersitegang, antara yang pro dan kontra kandidat Capres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan Capres 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Polarisasi itu terjadi tidak hanya di kalangan partai politik pendukung, tetapi juga di kalangan tokoh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang notabene tidak terlibat dalam percaturan politik praktis secara langsung.

Polarisasi politik dukungan terhadap kandidat Capres pada Pilpres 2019 itu juga terjadi di lingkungan Muhammadiyah. Polarisasi politik itu dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yakni (1) pendukung Capres 01, (2) pendukung Capres 02 dan (3) netral. Hal itu cukup menarik dikaji karena secara resmi, Persyarikatan Muhammadiyah, sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, tidak berafiliasi kepada kandidat tertentu dalam Pilpres 2019. Muhammadiyah menyatakan netral dan menjaga jarak yang sama dalam Pilpres 2019 dan dalam Pemilu Legislatif 2019[2].

Oleh karena itu, penelitian ini **dilatarbelakangi** oleh polarisasi politik para elit Muhammadiyah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang lalu. Meskipun bukan sebagai partai politik yang memiliki kewenangan mengajukan calon atau mendukung calon tertentu, bagi Muhammadiyah kompetisi politik itu tidak terhindarkan karena gerakan Islam ini menjadi bagian dari komponen bangsa sekaligus hidup menyatu dengan masyarakat. Sebagai organisasi massa keagamaan yang memiliki massa besar dan ribuan amal usaha di berbagai bidang[3], Muhammadiyah ibarat gadis cantik yang menawan dan diperebutkan banyak pemuda. Oleh karena itu, dalam setiap kontestasi politik elektoral, Muhammadiyah berpotensi menjadi ajang perebutan berbagai kepentingan politik manapun. Itulah yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 lalu. Karena Muhammadiyah menegaskan sikap netralnya dan memberikan kebebasan warganya untuk menentukan pilihannya, maka keberagaman atau bahkan polarisasi sikap politik tokoh-tokoh Muhammadiyah dan warga persyarikatan menjadi tak terhindarkan.

Berdasarkan latar pemikiran tersebut, penelitian ini **ditujukan** untuk memetakan sikap politik para elit Muhammadiyah pada Pilpres 2019 dan dinamika politik yang terjadi di kalangan warga persyarikatan selama berlangsung kontestasi Pilpres 2019. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud menjelaskan sikap resmi Muhammadiyah dalam Pilpres 2019.

Penelitian kualitatif ini berusaha menjawab berbagai persoalan penelitian yang diajukan dengan melakukan pengumpulan data melalui **metode** penelitian kepustakaan (*library research*). **Tahapan** yang telah dilakukan adalah merumuskan instrumen penelitian, mengumpulkan berbagai referensi sebagai sumber data sekunder, baik dalam bentuk dokumen maupun literatur pustaka dan

arsip video pemberitaan yang relevan untuk mendapatkan data penelitian, menganalisis data dan menulis hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian yang dicapai adalah sebagai berikut. Di kalangan elit Muhammadiyah, ada tiga faksi dalam menyikapi Pilpres 2019. Pertama, *Pertama*, faksi kosong satu yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Tokoh utama faksi ini adalah Buya Syafii Ma'arif, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1998-2005[4] dan Muhajir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Jokowi periode 1 dan Menko PPM di periode kedua. *Kedua*, faksi kosong dua yang mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Tokoh sentral faksi ini adalah M. Amien Rais [6], Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1995-1998 dan M. Din Syamsudin [7], Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015. *Ketiga*, faksi jalan tengah yang secara tegas dan lugas menyatakan netralitasnya atau minimal tidak mengekspresikan afiliasinya ke ruang publik secara terbuka. Tokoh utama faksi ketiga ini adalah Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah saat ini (periode 2015-2020). [9]

Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi.

Kata kunci maksimal 5 kata

Polarisasi politik; elit Muhammadiyah; Pilpres 2019

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang telah diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.

Latar Belakang Penelitian

Sejak awal didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, Muhammadiyah tidak pernah didesain sebagai organisasi politik yang akan terlibat dalam pergumulan mengejar-ngejar kekuasaan (*struggle for power*) dan aneka kedudukan dalam pemerintahan, sebagaimana partai politik. Namun, sebagai gerakan *da'wah amar ma'ruf nahi munkar* yang bergerak di tengah-tengah masyarakat dan sebagai organisasi massa yang menaungi jutaan umat, ribuan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya[3], Muhammadiyah tidak mungkin menghindarkan diri dari konstelasi politik nasional dan aneka problema kebangsaan dan kenegaraan, baik dalam bentuk diskursus pemikiran politik maupun pertautan dengan aktivitas politik.

Contoh paling fenomenal konstelasi politik nasional yang berdampak pada Muhammadiyah adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Secara sosio politik, Pilpres itu telah “membelah” masyarakat ke dalam dua kubu; pendukung Capres 01 dan pendukung Capres 02. Masyarakat terpolarisasi dalam

dukung mendukung kandidat yang dipandang layak memimpin Indonesia periode 2019-2024. Tagar 2019 ganti Presiden (#2019GantiPresiden) dan tagar 2019 tetap Jokowi (#2019TetapJokowi) dengan aneka narasinya, mewarnai media sosial dan diskursus sosio-politik masyarakat.

Polarisasi politik itu juga terjadi di lingkungan warga Muhammadiyah, dari tingkat elit sampai akar rumput (*grass roots*). Ada elit Muhammadiyah yang menyatakan dukungan terbukanya kepada Capres 01 Jokowi-Ma'ruf. Di sisi lain, ada juga elit Muhammadiyah yang menyatakan dukungannya pada Capres 02 Prabowo-Sandi. Namun ada juga elit Muhammadiyah yang tidak mengekspresikan sikap politiknya secara terbuka. Para elit itu sebelumnya pernah memimpin Muhammadiyah atau minimal masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan polarisasi politik di kalangan elit Muhammadiyah pada Pilpres 2019?
2. Apakah polarisasi politik elit itu juga terjadi di kalangan warga Muhammadiyah?
3. Bagaimana Muhammadiyah menyikapi polarisasi politik pada Pilpres 2019 tersebut?

Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan pemetaan polarisasi politik di kalangan elit Muhammadiyah dalam menyikapi Pilpres 2019.
2. Mengelaborasi dinamika politik yang terjadi di kalangan warga Muhammadiyah selama Pilpres 2019.
3. Menjelaskan sikap politik Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu, khususnya Pilpres 2019.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini cukup penting dilakukan karena belum ditemukan penelitian serupa yang secara spesifik membahas polarisasi politik di kalangan elit Muhammadiyah pada Pilpres 2019. Sebagai ormas keagamaan yang menaungi ribuan amal usaha di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan serta memiliki jutaan anggota, sikap politik Muhammadiyah dan para elitnya cukup berpengaruh pada konstelasi politik nasional.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian

pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

Tinjauan Pustaka

Polarisasi Politik

Polarisasi politik dalam penelitian ini dipahami sebagai perbedaan dalam cara pandang yang melahirkan faksi-faksi politik dalam memahami persoalan tertentu yang terkait dengan masalah politik. Polarisasi itu terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan sikap individu atau kelompok atas situasi politik atau isu-isu politik yang sedang terjadi. Chloe Carmichael, seorang psikolog klinis Amerika Serikat, menyebutkan polarisasi politik sebagai masalah psikologis. Dalam artikelnya yang bertajuk "*Political Polarization Is a Psychology Problem*," di kanal berita dan opini terkenal di AS *The HuffingtonPost*, Chloe menyebutkan bahwa polarisasi politik berkembang dalam masyarakat disebabkan oleh adanya pengidentifikasian diri yang sangat kuat dalam individu atau kelompok. Adanya penilaian-penilaian sepihak antar individu atau kelompok yang bertentangan, semakin menguatkan identifikasi diri atas nilai-nilai yang selama ini mereka anggap benar.[10]

Piercarlo Valdesolo dan Jesse Graham (ed) dalam bukunya "*Social Psychology of Political Polarization*" menyebutkan hal senada bahwa polarisasi politik merupakan gejala psikologi sosial. Perselisihan atau pertentangan yang terjadi antar pihak biasanya disebabkan oleh ketidaksetujuan atas isu-isu yang berkembang luas di masyarakat. Penilaian yang terjadi antar kedua belah pihak yang berlawanan atas situasi tertentu akan semakin memperburuk keadaan situasi dan kondisi yang terjadi tersebut dan akan terus-menerus berputar dalam area ketidaksepahaman.[11]

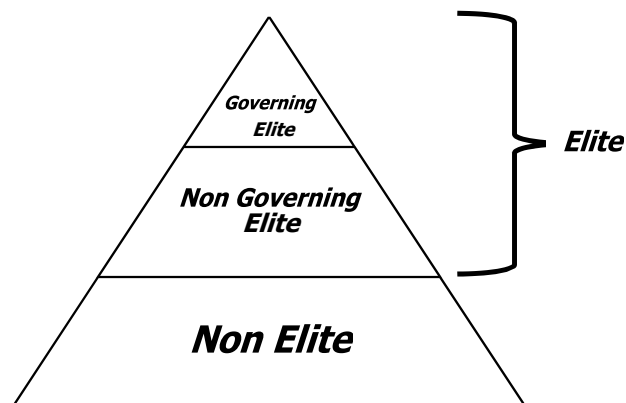
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa polarisasi politik merupakan fragmentasi pandangan dan sikap politik seseorang atau sekelompok orang tentang peristiwa atau isu-isu politik. Perbedaan pandangan itu dilatarbelakangi oleh perspektif yang berbeda karena berbagai faktor, seperti perbedaan afiliasi politik, ideologi, kepentingan atau pemahaman tentang isu politik itu. Perbedaan pandangan itu kemudian memunculkan faksi-faksi politik yang memiliki sikap politik yang beragam dan bahkan bertentangan dalam merespons isu politik tertentu, misalnya terkait dengan kontestasi elektoral untuk memilih pemimpin negara.

Elit Muhammadiyah

Kajian teoritik tentang elit pada penelitian ini merujuk pada karya Robert D Putnam, profesor pada John F. Kennedy School of Government, USA, dalam bukunya yang terkenal "*The Comparative Study of Political Elites*" (1976). Putnam melakukan kajian tentang teori-teori klasik tentang elit yang dikemukakan para teoritis elit seperti Gaetano Mosca dalam "*The Ruling Class*" (1939), Vilfredo Pareto dalam "*Sociological Writing*" (1966), Robert Michels dalam "*Political*

Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy (1959), TB Bottomore, *“Elites and Society”* (1964) dan lain-lain. Kajian mereka seputar isu elit dan kekuasaan. Pareto dan Mosca, misalnya, menyatakan bahwa di setiap masyarakat, baik masyarakat yang masih tradisional ataupun yang modern, pasti dapat diketemukan sekelompok kecil (minoritas) individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya. Sekelompok kecil individu tadi adalah lapisan elit yang sedang memerintah atau *“governing elite”* dan kelompok elit yang tidak sedang memerintah atau *“non-governing elite”*. Mereka yang termasuk dalam kelompok elit yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan-jabatan politis. Mereka yang termasuk dalam kelompok yang tidak sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan-jabatan politis, tetapi mempunyai kemampuan untuk memengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan.[12]

Pendapat tersebut, apabila dipaparkan dalam bentuk grafik menunjukkan sebuah piramida yang terbagi menjadi beberapa lapis. Piramida tersebut melukiskan masyarakat yang terbagi menjadi dua lapis, yakni anggota masyarakat yang termasuk dalam kelompok elit yang jumlahnya lebih sedikit apabila dibandingkan lapis lainnya yang terdiri dari anggota masyarakat pada umumnya yang tidak termasuk dalam kelompok elit (*non-elite*). Sementara itu, mereka yang termasuk dalam kelompok elit masih dipilah lagi menjadi dua, yakni mereka yang termasuk dalam kelompok elit yang sedang memerintah (*governing elite*) yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang termasuk dalam kelompok elit, tetapi tidak sedang memerintah (*non-governing elite*). Piramida tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:[13]



Kerangka teoritik itu dapat ditarik dalam perspektif yang lebih luas tentang fenomena elit di masyarakat, selain di bidang politik, yakni elit di bidang ekonomi, sosial, hukum, agama dan organisasi sosial kemasyarakatan serta berbagai cabang kehidupan lainnya. Bahwa dalam setiap cabang kehidupan yang ada di masyarakat akan memunculkan sebagian anggotanya sebagai elit. Merekalah yang menduduki struktur puncak bidang kehidupan tersebut dan memiliki pengaruh yang luas, baik ucapannya maupun yang terkait dengan sikap, tindakan dan keputusannya.

Dari uraian teoritik tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang lebih spesifik bahwa elit Muhammadiyah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki atau pernah memiliki kedudukan puncak di organisasi/ pesyarikatan sebagai Ketua Umum atau paling tidak masuk dalam jajaran struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

State of the Art

Kajian tentang perilaku politik elit Muhammadiyah sudah banyak dilakukan para peneliti. Pada penelitian ini hanya diambil tiga di antaranya. *Pertama*, penelitian Ridho Al-Hamdi yang berjudul “Dinamika Islam dan Politik Elit-Elit Muhammadiyah Periode 1998-2010.” [14] Penelitian ini bertujuan mengkaji sikap politik elit Muhammadiyah sebagai representasi kaum modernis dalam merespon dinamika Islam dan politik pasca Orde Baru. Ada tiga isu yang dijadikan sebagai basis analisis, yaitu munculnya partai-partai Islam, keinginan untuk pengembalian Piagam Jakarta sebagai azas negara, dan munculnya fenomena terorisme yang selalu dilekatkan sebagai jihad. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ada empat varian perilaku kaum modernis, yang direpresentasikan oleh elit-elit Muhammadiyah, yaitu sikap transformatif-idealistik, sikap moderat-idealistik, sikap realistik-kritis, dan sikap akomodatif-pragmatis. Keempat varian tersebut sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor latar belakang sosiologis masing-masing elite dan faktor pemahaman masing-masing elite terhadap organisasi Muhammadiyah.

Kedua, penelitian David Effendi, “Fragmentasi Politik Muhammadiyah: Studi Tentang Elite Muhammadiyah dalam Pemilihan Presiden Tahun 2009”. [15] David mengkaji tentang fragmentasi politik para elit Muhammadiyah dalam menyikapi Pemilu 2009. Ada dua kesimpulan utama yang ditemukan. Temuan pertama, spektrum fragmentasi politik elit Muhammadiyah sangat beragam. Varian tersebut antara lain pragmatisme politik, kubu moderat pasif, moderat aktif, dan varian kubu khitois yang selalau berargumen bahwa keterlibatan politik sebatas yang diatur atau dibolehkan oleh keputusan organisasi. Terakhir adalah kelompok apolitis. Kelompok yang tidak berminat atau tertarik pada urusan politik karena menganggap Muhammadiyah bukanlah organisasi politik.

Temuan kedua adalah terkait sebab-sebab terjadinya fragmentasi sikap politik para elit Muhammadiyah. Terjadinya fragmentasi sikap politik di kalangan elit Muhammadiyah dikarenakan beberapa hal antara lain; kontinuitas sejarah, intervensi ideologi ‘asing’, desain organisasi yang inklusif dan otonom menjadi infrastuktur paling kokoh untuk tidak berada dalam satu kubu sikap politik, pragmatisme elit.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Ahmad Sholikin yang berjudul Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah Antara Pusat dan Daerah.[16] Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sikap netralitas Muhammadiyah menentukan sikap politiknya dalam proses politik elektoral pada Pemilu 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merumuskan sebuah kebijakan politik Muhammadiyah

mendasarkan semua keputusannya pada khittah politik Muhammadiyah yang menjadi acuan baku organisasi. Tetapi dengan konsep kepemimpinan yang kolektif dan kolegial terdiri dari 13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah maka masing-masing tokoh elite tersebut memiliki pemikiran politik yang berbeda-beda. Faksionalisasi dalam elite internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah berakibat pada terjadinya deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah pada level lokal. Sehingga netralitas politik elektoral Muhammadiyah selama ini dimaknai sebagai sebuah sikap ambigu yang sering dimanfaatkan oleh elite Muhammadiyah sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah.

Meskipun penelitian ini substansinya sama dengan ketiga penelitian tersebut yakni perilaku elit politik Muhammadiyah, tetapi kasus yang diangkat berbeda dengan ketiganya. Ketiga penelitian terdahulu mengambil spektrum kondisi politik pasca Orde Baru, yakni Pemilu 2004, 2009 dan 2014. Sedangkan penelitian ini fokus utamanya pada polarisasi politik elit Muhammadiyah dalam menyikapi Pemilu Presiden 2019.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang telah dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

Metode Mencapai Tujuan

Metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

Pertama, pengumpulan data. Pada tahap ini, tim peneliti akan melakukan pengumpulan data dari berbagai literatur dalam bentuk buku, jurnal, artikel, pemberitaan media cetak, elektronik maupun online yang relevan.

Kedua, analisis data. Peneliti melakukan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

Ketiga, penulisan laporan hasil penelitian. Pada tahap ini, tim peneliti akan menyusun laporan hasil penelitian.

Keempat, penyusunan luaran penelitian. Setelah tahap penyusunan laporan hasil penelitian selesai dilakukan, Tim Peneliti akan menyusun luaran penelitian dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi dan draft buku.

Hasil Penelitian tidak lebih dari 1000 kata

Hasil Penelitian

Sebagaimana diketahui, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 diikuti oleh dua pasang calon, yakni nomor urut 01 pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin

dan nomor urut 02 pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagaimana lazimnya konstetasi politik dalam setiap pemilu, selalu menghadirkan polarisasi di kalangan masyarakat yang memiliki preferensi dan afiliasi dukungan politik yang berbeda-beda.

Begitu juga halnya di kalangan Muhammadiyah. Meskipun sebagai organisasi Muhammadiyah telah menegaskan sikap netralnya dalam menghadapi Pilpres 2019, polarisasi sikap politik di kalangan elit Muhammadiyah tetap tak terhindarkan. Ada faksi-faksi politik yang mewarnai konstelasi dan relasi antar elit Muhammadiyah, baik elit nasional maupun lokal terkait dengan kandidat pemimpin negara yang dianggapnya paling membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa dan negara.

Polarisasi politik di kalangan elit Muhammadiyah itu dapat dipetakan dalam tiga faksi sebagai berikut:

Pertama, faksi kosong satu. Faksi ini preferensi politiknya kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Dukungan paling nyata faksi ini ditunjukkan oleh mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif. Tokoh Muhammadiyah itu menilai, dalam hal pembangunan infrastruktur, Jokowi telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding para pendahulunya. Tidak hanya itu, Buya juga menyanjung Jokowi sebagai presiden yang punya nyali.[17] Selain Syafii, tokoh Muhammadiyah yang berada di faksi kosong satu adalah Muhajir Effendi, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Pendidikan dan kemudian Menko PMK.

Faksi kosong satu tidak hanya melibatkan beberapa elit Muhammadiyah, tetapi juga kalangan muda Muhammadiyah. Sejumlah tokoh yang pernah memimpin organisasi otonom Muhammadiyah, seperti Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM dan lainnya juga berada di barisan pendukung Jokowi. Mereka antara lain mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Imam Ad Daruquthni, mantan Ketua Umum IMM Ahmad Rofiq yang kini menjadi Sekjen Perindo, Mantan Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institut Raja Juli Antoni, yang kini menjadi Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Konsolidasi di kalangan kaum muda Muhammadiyah untuk mendukung Jokowi juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya eksponen Muda Muhammadiyah gabungan dari Solo Raya dan perwakilan dari 18 provinsi di Indonesia mendeklarasikan Eksponen Muda Muhammadiyah Dukung #01 di Gedung Lamin Eram Jalan Indronoto No 89 Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (30/3/2019). [18]

Selain itu, di kalangan aktivis muda Muhammadiyah juga dibentuk Rumah Indonesia Berkemajuan (RIB) yang dipimpin kader muda Muhammadiyah Khoirul Muttaqin. Menurut Khoirul, dukungan kepada Jokowi dilakukan karena

kepemimpinan Jokowi di bidang pembangunan dilakukan secara berkeadilan, merata dan sangat memperhatikan rakyat kecil. [19]

Kedua, faksi kosong dua. Faksi ini preferensi politiknya kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sejumlah tokoh Muhammadiyah berada dalam faksi ini. Tokoh yang paling vokal adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais. Selain Amien, bendahara umum PP Muhammadiyah Suyatno. Amien dan Suyatno masuk dalam Tim Pemenangan Prabowo-Sandi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M Din Syamsuddin juga di dalam faksi ini, meskipun Din tidak mengemukakan secara demonstratif sebagaimana Amien dan Suyatno.

Din menyampaikan beberapa pandangannya terkait Pilpres 2019, antara lain: Pertama, Pilpres sebagai sarana memilih pemimpin adalah tanggung jawab kebangsaan dan keagamaan sekaligus. Warga Muhammadiyah tidak baik jika tidak memilih (golput) karena itu mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab. *Kedua*, karena harus memilih dan tentu ada pasangan calon (paslon) yang dipilih, maka tidak ada sikap netral. Sikap netral mencerminkan keragu-raguan, ketakpastian, dan illiterasi politik, yang akan membawa kerugian. *Ketiga*, bahwa organisasi Muhammadiyah tidak menentukan pilihan, itu sudah seyogyanya. Tapi warga Muhammadiyah harus mempunyai pilihan. Pilihan tersebut boleh dinyatakan atau tidak dinyatakan. “Saya pribadi tidak netral dan memilih dengan haqqul yaqin yang saya nilai peduli dan dapat membela aspirasi Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah secara sungguh-sungguh dan berkeadilan dalam kerangka kebersamaan seluruh rakyat Indonesia. Pilihan itu tidak perlu saya ungkapkan karena saya tahu pasti warga Muhammadiyah cerdas sehingga Takfyll ‘aqil al-isyarah, cukuplah bagi orang cerdas itu isyarat,” ungkap Din. [20]

Sama halnya dengan di faksi kosong satu, dalam faksi kosong dua juga terdapat tokoh-tokoh muda Muhammadiyah. Misalnya mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Izzul Muslim serta Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Makmun Murod. Dahnil bahkan ditunjuk sebagai juru bicara Tim Pemenangan Prabowo-Sandi. [21]

Selain dari kalangan elit, tokoh muda Muhammadiyah juga banyak yang mendukung Prabowo-Sandi. Mereka mendeklarasikan Aliansi Pencerahan Indonesia (API) di Jakarta, Minggu (3/3/2019). [22] Salah satu pengurus API Izzul Muslimin yang juga mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah menyatakan API merupakan wadah pemenangan dari beberapa elemen dan relawan pendukung pasangan tersebut. Izzul mengatakan, ada delapan elemen relawan yang sudah bergabung bersama API. Di antaranya Surya Madani Indonesia (SMI), RelawanMu Indonesia, Relawan Matahari Minang Indonesia (RaMMI), Saudagar Matahari (Sadari Pass), Relawan Matahari Nusantara, Barisan Pass, Koalisi Masyarakat Kewirausahaan Indonesia (KMKI), dan Relawan Madani Indonesia (RMI). [23]

Ketiga, faksi kosong-kosong. Faksi ini secara tegas dan lugas menyatakan sikap

netralnya dalam Pilpres 2019. Tokoh utama faksi ini adalah Haedar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Karena saat ini Haedar masih menjabat Ketua Umum PP, sudah pasti sikap politiknya tegak lurus dengan sikap resmi Muhammadiyah yang menyatakan netralitasnya dalam Pilpres 2019.

Menurut Haedar, “Pemilu 2019 baik untuk Pilpres maupun Pileg akan melibatkan proses politik yang berkompetisi secara terbuka. Politik dalam praktiknya akan melibatkan sikap dukung mendukung maupun sebaliknya tolak-menolak, baik yang terbuka maupun tertutup. Bagi Muhammadiyah tentu kompetisi politik itu juga tidak terhindarkan karena gerakan Islam ini menjadi bagian dari komponen bangsa sekaligus hidup menyatu dengan masyarakat. Warga Muhammadiyah akan menjadi lahan bagi kepentingan politik manapun dan itu alamiah dalam proses politik bagi organisasi bermassa besar seperti ini. Sikap politik warga Muhammadiyah pun beragam, satu sama lain memiliki dukungannya sendiri. Akan ada juga yang aktif menjadi relawan maupun tim pemenangan. [24].

Sikap Politik Muhammadiyah

Terlepas dari faksi-faksi politik para elitnya, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah untuk menjaga netralitasnya. Ada 6 instruksi yang dikeluarkan PP, antara lain “Menjaga netralitas institusi Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah termasuk Perguruan Tinggi serta kantor-kantor Muhammadiyah dari segala bentuk kampanye dan kegiatan dukungmendukung terhadap pasangan calon dan kontestan manapun atau kegiatan politik praktis lainnya dalam kaitan Pemilu 2019.

Sikap politik Muhammadiyah terkait Pilpres 2019, selengkapnya dapat disimak di bawah ini:[25]



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**INSTRUKSI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 02/INS/L0/E/2019
TENTANG
MENJAGA NETRALITAS PERSYARIKATAN DAN AMAL USAHA**

Pemilu yang akan berlangsung 17 April 2019 semakin mendekat. Warga Muhammadiyah tidak boleh apatis dalam menghadapi Pemilu 2019, artinya anggota Muhammadiyah agar menjadi pemilih yang aktif, cerdas, dewasa, bertanggungjawab, dan berbekal keilmuan guna menyukseskan kontestasi politik lima tahunan tersebut sebagai sarana demokrasi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Sejalan dengan prinsip Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan organisasi kemasyarakatan yang non-politik praktis maka diinstruksikan kepada seluruh anggota, kader, dan pimpinan di seluruh jajaran Persyarikatan Muhammadiyah:

1. Memedomani Kepribadian, Khittah, dan Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menghadapi tahun politik 2019 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Legislatif.
2. Menjaga netralitas institusi Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah termasuk Perguruan Tinggi serta kantor-kantor Muhammadiyah dari segala bentuk kampanye dan kegiatan dukung-mendukung terhadap pasangan calon dan kontestan manapun atau kegiatan politik praktis lainnya dalam kaitan Pemilu 2019.
3. Menjaga kekompakkan, kebersamaan, keutuhan, dan persatuan di seluruh lingkungan Muhammadiyah sebagai hal yang sangat penting dan berharga yang menjadi kekuatan gerakan selama ini.
4. Sesama anggota, kader, dan personal pimpinan di lingkungan Persyarikatan maupun Amal Usaha serta segenap institusi lainnya tetap memelihara persaudaraan, toleransi atau tasamuh, saling memahami, dan lapang hati dalam menghadapi situasi politik serta perbedaan pilihan politik dengan landasan nilai-nilai luhur Ajaran Islam dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah.
5. Senantiasa menjaga marwah dan prinsip gerakan Muhammadiyah dalam berbagai aspeknya serta janganlah karena urusan politik 2019 membuat terganggu keutuhan, persatuan, dan kebersamaan sesama keluarga besar Persyarikatan.
6. Menjaga keberadaan Muhammadiyah dan lingkungan sekitar tetap kondusif menuju pelaksanaan Pemilu yang demokratis, aman, damai, taat asas, serta terjaga keutuhan bangsa dan negara.

Semoga Allah Yang Maha Rahman dan Rahim senantiasa membimbing hati, pikiran, sikap, dan tindakan segenap keluarga besar warga Muhammadiyah untuk tetap berada di Jalan-Nya dalam rengkuhan ridha dan karunia-Nya.

Yogyakarta: 08 Rajab 1440 H
15 Maret 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
NBM: 545 549

Sekretaris,



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM: 608 658

Luaran Penelitian

Luaran Penelitian yang direncanakan adalah dalam bentuk artikel di Jurnal Ilmiah nasional.

Kesimpulan tidak lebih dari 500 kata

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, dalam menyikapi Pilpres 2019 terjadi polarisasi politik di kalangan elit Muhammadiyah dan tokoh muda Muhammadiyah. Polarisasi itu diklasifikasikan dalam tiga faksi, yakni faksi

kosong satu yang preferensi politiknya ke Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin, faksi kosong dua yang arah afiliasi politiknya ke Capres-Cawapres Prabowo-Sandi dan faksi kosong kosong yang menegaskan netralitasnya.

Kedua, dalam menyikapi Pilpres 2019, Muhammadiyah secara resmi menegaskan sikap netralitasnya, baik di kalangan persyarikatan maupun amal usahanya.

Ketiga, terhadap elit atau kader Muhammadiyah yang mendukung atau menjadi relawan dan bahkan tim pemenangan, Muhammadiyah menginstruksikan tidak mengatasnamakan organisasi dan tetap menjaga ukhuwah serta tidak diperkenankan mengklaim paling memperjuangkan Islam.

Keempat, warga Muhammadiyah dihimbau tidak golput dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab demi menghadirkan pemimpin yang membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

Kelima, meskipun terjadi faksi-faksi politik di kalangan elit Muhammadiyah dalam menyikapi Pilpres, Muhammadiyah tetap solid dan tetap istiqamah mengusung misi dakwah *amar makruf nahi munkar* dan berada di luar arena percaturan politik dan perebutan kekuasaan

Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

[1] <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/09/08/begini-tafsir-ayat-perubahan-yang-menggerakkan-muhammadiyah/>

[2] [Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/INS/I.0/E/2019 tentang Menjaga Netralitas Persyarikatan dan Amal Usaha tanggal 15 Maret 2019](#)

[3] <http://www.muhammadiyah.or.id/en/content-8-det-amal-usaha.html>

[4] <https://www.tagar.id/buya-syafii-maarif-tokoh-muhammadiyah-yang-setia-dukung-jokowi>

[5] <https://regional.kompas.com/read/2019/03/30/15395461/eksponen-muda-muhammadiyah-deklarasi-dukung-jokowi-maruf-amin>

[6] <https://kumparan.com/kumparannews/prabowo-gembira-didukung-amien-rais-pks-demokrat-hingga-212-1548496758357299737>

[7] <https://nasional.sindonews.com/read/1341400/12/pengamat-tangkap-kecenderungan-din-syamsuddin-dukung-prabowo-sandi-1537948315>

[8] <https://nasional.tempo.co/read/1130123/tokoh-muhammadiyah-di-kubu-prabowo-sandiaga>

[9] <https://www.merdeka.com/politik/haedar-nasir-muhammadiyah-netral-dan-aktif-di-pilpres-2019.html>

[10] Chloe Carmichael, "Political Polarization Is a Psychology Problem," *Huffpost*, 8 November 2017, https://www.huffpost.com/entry/political-polarization-is-a-psychology-problem_b_5a01dd9ee4b07eb5118255e5

[11] Piercarlo Valdesolo dan Jesse Graham, *Social Psychology Of Political Polarization* (New York: Routledge, 2016), 25.

[12] Mohctar Mas' oed dan Colin Mc.Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2018.

[13] Haryanto, Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar, Penerbit PolGov, 2017

[14] Jurnal Studi Pemerintahan Volume 3 Nomor 1 Februari 2012

[15] https://www.academia.edu/890636/Politik_Muhammadiyah_Fragmentasi_Elit_e_Muhammadiyah_dalam_pemilu_Presiden_2009

[16] Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta Vol. 3 No. 2 (September-Februari 2018)

[17] <https://www.tagar.id/buya-syafii-maarif-tokoh-muhammadiyah-yang-setia-dukung-jokowi>

[18] <https://regional.kompas.com/read/2019/03/30/15395461/eksponen-muda-muhammadiyah-deklarasi-dukung-jokowi-maruf-amin>

[19] <https://www.jpnn.com/news/rib-yakin-80-persen-warga-muhammadiyah-pilih-jokowi-maruf>

[20] <https://pwmu.co/91614/03/19/din-syamsuddin-muhammadiyah-tak-boleh-netral-pada-pemilu-20192/>

[21] <https://nasional.tempo.co/read/1130123/tokoh-muhammadiyah-di-kubu-prabowo-sandiaga>

[22] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190303142632-32-374162/dukung-prabowo-eksponen-muhammadiyah-janjikan-25-juta-suara>

[23] <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/15/pdhqwy409-aktivis-muhammadiyah-bentuk-tim-dukung-prabowosandi>

[24] <https://www.beritasatu.com/iman-rahman-cahyadi/politik/507617/ini-imbauan-ketum-pp-muhammadiyah-terkait-pemilu-2019>

[25] <https://www.suaramuhammadiyah.id/2019/03/16/instruksi-pp-muhammadiyah-tentang-menjaga-netralitas-dalam-pemilu-2019/>